KONSEP *RUKSHAHDAN* IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERNIKAHAN

Ahmad Jalili

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

jalili_ru@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kajian ini hendak menelaah lebih jauh dari perspektif *maqashid syariah* terhadap *rukshah* dalam pernikahan. Hal ini bertujuan mendapatkan gambaran jelas perihal batasan-batasan dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Dari kajian ini menegaskan, relasi antara *rukhsah* dan *maqashid syariah* memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut, nampak dari tujuan utama daripada *rukhsah* yang diberikan oleh *Syarī'* kepada umat manusia tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Hubungan antara *maqashid syariah* dan *rukshah* memiliki kesamaan prinsip dan tujuan. Secara prinsip, yakni memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi setiap *mukallaf*, sedangkan tujuan yakni untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari konsep *rukhsah* di bidang hukum pernikahan adalah di antaranya; (1) hukum dibolehkannya berpoligami bagi laki-laki, meskipun tidak mampu secara materi dan bersikap adil terhadap para istrinya jika memiliki uzur, seperti laki-laki hiperseksual, istrinya mandul dan sebagainya. (2) hukum diperbolehkannya memandang wanita yang dikhitbah karena adanya kebutuhan/alasan, diantaranya untuk memantapkan hati bagi si pelamar. (3) hukum dibolehkannya nikah *mut'ah* di zaman Rasulullah. Dengan demikian, kajian *ushul fiqh* perlu menjadi pertimbangan penting dalam setiap kajian fikih.

ABSTRACT: This study aims to further investigate the perspective of *Maqashid sharia* towards *rukshah* in marriage. It is to obtain a clear description of the limitations in its implementation. This study is a library research which is a study whose data comes from the literature related to the object of research, then, the content of the data are analyzed. This study has confirmed that *rukhsah* and *maqashid sharia* has a very close relationship. The relationship can be seen from the main purpose of *rukshah* given by *Syarī'* to mankind that is the realization of benefit for mankind itself. The relationship between *maqashid sharia* and *rukshah* is that both have the same principles and goals. In principle, it provides convenience and eliminates difficulties for every *mukallaf*, while the goal is to maintain benefit and avoid damage. The implications of law arising from the concept of *rukhsah* in the field of marriage law are: (1) the law of the allowance of men to do polygamy even though they are not materially capable and are fair to their wives if they have age like hypersexual men, their wives are barren and so on; (2) the law of the allowance to see the proposed-women because of the need / reason for the men as the proposers to ensure themselves; and (3) the law of allowance to do *mut'ah* marriage in the Prophet era. Thus, the study of *ushul fiqh* needs to be mainly considered in every *fiqh* study.

Keywords: Concepts, *Rukhsah* and Rulings of Marriage

PENDAHULUAN

Perdebatan para pakar *ushul* terkait diskursus term *rukhsah* sangat menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Karena meskipun di antara *ushuliyun* terdapat kesamaan dalam memahami *rukhsah* secara umum, tetapi

secara teoritis terjadi perbedaan mendasar dalam merumuskan konsep *rukhsah* dalam berbagai perspektifnya. Perbedaan itu, lebih disebabkan karena *rukhsah* memang memiliki makna yang multi-interpretatif. Di pihak lain, *rukhsah* juga seringkali dijadikan

dalil dalam melegalkan sesuatu yang diharamkan, karena sudah mengarah kepada *tatabu' ar-rukbas* (mencari-cari kemudahan dengan motif memenuhi hawa nafsunya).

Pembahasan mengenai term *rukhsob* dalam kajian fikih dan ushulnya memang telah dilakukan oleh para sarjana Muslim klasik maupun kontemporer. Di antara literatur-literatur klasik di bidang ushul fikih seperti: *Al-Mustashfa Min Ilmil Ushul* karya Imam Al-Ghazali, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam* karya Abu Hasan Al-Amidy, *Al-Muwafaqot fi Ushul al-Fiqh* karya Imam as-Syathibi, *Taqwimul Adillah Fi Ushulil Ahkam* karya Ad-Dabusi, *Kitab Fi Ushulil Fiqh* karya Al-Lamisyi, *Al Taudlib li matn Al Tanqib fii Ushul Fiqh*, karya Imam Al Qodli Shodr Syari'at Abdullah bin Mas'ud Al Mahbubi, dan kitab lain yang ada kaitanya dengan pembahasan ini, baik secara etimologis maupun secara terminologis.

Syekh Hudhari Biek menjelaskan dalam kitabnya, bahwa *rukhsob* dalam syara' mempunyai empat esensi.¹ *Pertama*, suatu hukum yang dikecualikan dalam sekawanan hukum-hukum lainnya yang bersifat universal yang menunjukkan larangan secara mutlak. Seperti hukum akad salam, *musaqob* dan lainnya yang merupakan pengecualian dari kaidah-kaidah dasar dalam akad atau transaksi. *Kedua*, hukum yang dihapuskan karena hukum-hukum tersebut memberatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang dulu pernah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, seperti cara mensucikan najis, di zaman Nabi Musa as. pakaian yang terkena najis harus dipotong, tetapi umat Nabi Muhammad baju yang terkena najis dapat disucikan dengan membasuhnya dengan air yang suci. *Ketiga*, hukum-hukum syariat yang memberikan kelonggaran secara mutlak dalam mencapai tujuan kebahagiaan seorang *mukallaf*, seperti dalam dibolehkannya poligami. *Keempat*, hukum yang disyariatkan karena adanya udzur yang memberatkan, dan hukum tersebut sebagai pengecualian dari hukum-hukum dasar yang bersifat universal karena hanya bersifat temporer dan

kondisional, contohnya dibolehkannya mengqoshar dan menjama' shalat ketika dalam perjalanan, diperbolehkan tayamum sebagai ganti wudhu.

Gambaran di atas telah mempertegas bahwa pembahasan term *rukhsob*, banyak disebutkan oleh para ulama. Namun, seringkali pembahasan tersebut dalam dalam porsi yang minimalis. Artinya, pembahasan *rukhsob* hanya menjadi bagian kecil dari seluruh pembahasan dalam kajian ushul fikih. Menurut penulis, belum ditemukan literatur ushul fikih klasik yang lebih spesifik membahas konsep *rukhsob* secara metodologis dan aplikatif yang lebih komprehensif. Hal demikian ini membuat kajian tentangnya menjadi terbuka lebar, apalagi bila dikaji secara tersebut lebih spesifik dalam bidang pernikahan.

Kajian fikih munakahat juga terdapat beberapa keringan atau *rukshab*. Bahkan, beberapa mazhab berbeda pendapat dalam melihat illat hukum terhadap rukshah dalam pernikahan itu sendiri. Misalnya, dalam kasus nikah tanpa wali dan saksi yang berdalih mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki sekaligus. Padahal, meskipun dalam mazhab Hanafi dibolehkan nikah tanpa wali, tetapi Imam Hanafi menjadikan walimah sebagai media pemberitahuan kepada orang lain menjadi syarat sahnya nikah. Demikian halnya, dalam mazhab Maliki meskipun saksi tidak menjadi rukun nikah, tetapi Imam Malik menjadikan wali nikah menjadi rukun nikah dan tidak sah tanpanya. Dengan demikian, nikah tanpa wali dan saksi, secara syar'i tidak sah, baik menurut mazhab Hanafi maupun Maliki. Bermazhab seperti ini dalam term ushul fikih disebut *talfiq*.

Kajian ini hendak menelaah lebih jauh dari perspektif maqashid syariah terhadap rukshah dalam pernikahan. Hal ini bertujuan mendapatkan gambaran jelas perihal batasan-batasan dalam implementasinya. Maka pertanyaan penting dalam penelitian ini ialah bagaimana hubungan konsep *rukhsab* dengan *maqashid syariah* dan implikasinya dalam pernikahan?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang

¹ Lihat, Hudhari Biek, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1999), hlm. 67.

berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.² Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Terkait hal tersebut, dalam penelitian ini, akan dihimpun data yang berhubungan dengan konsep *rukhsah* serta contohnya.

Relasi *Rukhsah* dan *Maqashid Syariah*

Menurut As-Subki *rukhsah* adalah hukum yang berubah kepada kemudahan dan keringan sebab adanya uzur serta tetapnya hukum asal bagi yang tidak mengalami uzur, seperti memakan bangkai bagi orang yang mengalami keadaan darurat.³ Dalam kitab *ar-Rukhs as-Syar'iyah: ahkamuha wa dhawabituha* disebutkan sebab-sebab seorang itu akan mendapatkan keringan atau *rukhsah* ketika mengalami kondisi-kondisi berikut: *ad-dharurah* (keadaan darurat), *al-masyaqqah* (kondisi sulit), *as-safar* (kondisi bepergian), *al-ikrah* (kondisi dipaksa), *al-maradh* (kondisi sakit), *an-nisyan* (kondisi lupa), *al-khata* (kondisi keliru), *al-jahl* (kondisi tidak tahu), *umum al-balwa* (kesulitan yang umum) dan *an-naqsh* (kondisi kekurangan).⁴ Dengan demikian, *rukhsah* adalah keringanan hukum sebab ada hal menghalanginya.

Sedangkan *maqashid syariah*, menurut Wahbah al Zuhaili, berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap

ketentuan hukum.⁵ Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqashid syariah* mengandung empat aspek, yaitu:⁶ *pertama*, Tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. *Kedua*, penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan. *Keempat*, penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.⁷

Inti dari *maqashid syariah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi, terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁸

Gambaran di atas mempertegas bahwa korelasi *rukhsah* dan *maqashid syariah* memiliki hubungan yang tidak terpisah. Korelasi ini termanifestasi pada hubungan keduanya di dalam hal menjaga dan memelihara kemashlahatan dan keringanan serta kemudahan bagi mukallaf dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini juga dapat tercermin dari definisi kedua term *rukhsah* dan *maqashid syariah* baik dari segi etimologi maupun terminologi.

Tujuan dari pensyariaan hukum-hukum adalah menjaga kemashlahatan manusia dan memberikan keringanan dan kemudahan serta menolak kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia. Dari sini, maka hubungan antara *maqashid syariah* dan *rukhsah* meliputi: *pertama*, keduanya

²M. Ali Sayuti, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 47

³ Az-Zarkasyi, *Tasnif al-Masami' bi Jam'i al-Jawami'* (tt.: Muassasah Qardubah, 1999), h. 95.

⁴ Usamah Muhammad bin Muhammad as-Sollabi, *ar-Rukhs as-Syar'iyah: Ahkamuha wa Dhawabituha*, (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002), h. 113.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz 2 h. 225

⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaunkani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 43.

⁷ As-Syatibi, *al-Muwafaqat*.....vol. 2, h. 4

⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324

memiliki prinsip yang sama, yakni memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan mukallaf. *Kedua*, keduanya memiliki tujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

***Rukshah* dan Implementasinya dalam Hukum Pernikahan**

1. Telaah Defenisi *Rukshah*

Kalangan Hanafiyah seperti al-Bazdawi berpendapat *rukhsah* adalah keringanan yang diberikan kepada *mukallaf* disebabkan adanya uz|ur, yang mana atas hukum perbuatan tersebut sebenarnya diharamkan bagi orang yang tidak memiliki uz|ur.

Mazhab Hanafiyah mensyaratkan seseorang untuk mendapatkan *rukhsah* bila ia mendapati pada dirinya suatu uz|ur tertentu. Sementara dalam pandangan An-Namlah, uz|ur ini hanya berhubungan dengan kondisi darurat, *masyaqqah* dan hajat. Dengan demikian, *rukhsah* ini hanya berlaku bagi orang yang dalam kondisi mendesak (*darurat*), kesulitan (*masyaqqah*) dan sangat membutuhkan (*hajat*).⁹

Menurut pandangan pandangan As-Syatibi *rukhsah* adalah hukum yang disyariatkan sebab adanya uz|ur yang sangat berat yang merupakan pengecualian dari hukum asal yang bersifat umum (*kulli*) yang menunjukkan larangan dan *Rukhsah* tersebut hanya terbatas bagi orang-orang yang membutuhkan terhadap sesuatu secara mendesak.¹⁰

Menurut penulis definisi *rukhsah* yang lebih sederhana tetapi komprehensif (*jami' mani'*) adalah hukum yang ditetapkan dan bertentangan dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil sebab adanya uz|ur. Adapun yang dimaksud dengan bertentangan dengan dalil di sini, secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa *rukhsah* harus ditetapkan berdasarkan dalil.

2. Implementasi *Rukshah* dalam Hukum Pernikahan

Konsep *rukhsah* dalam hukum Islam yang berdampak pada pengembangan hukum Islam. Karena dengan adanya *rukhsah* berarti dalam satu masalah memiliki dua sisi hukum yang berbeda, yakni hukum normal bagi mukallaf yang tidak memiliki uzur dan hukum darurat bagi yang memiliki uzur. Oleh karenanya pula, pada sub bab ini penulis uraikan implementasi *rukhsah* dalam hukum pernikahan sebagai berikut.

a. Rukhsah bai Laki-Laki untuk Berpoligami

Menurut Sayyid Quthb bahwa poligami merupakan *rukhsah* (keringanan). Oleh karena itu, ia hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak. Kebolehan itu, menurutnya, masih disyaratkan bagi laki-laki yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dimaksud di sini adalah dalam hal nafkah, muamalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi laki-laki (suami) yang tidak mampu adil, menurut dia diharuskan cukup satu saja. Dan bagi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, diperbolehkan melakukan poligami dengan jumlah istri dalam satu waktu maksimal empat orang.¹¹

Poligami merupakan solusi yang ditawarkan bagi laki-laki yang memiliki keadaan yang mendesak untuk berpoligami, beristeri lebih dari satu. Kebolehan di sini,

¹¹Al-Maragi dalam kasus ini mengatakan bahwa kebolehan berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Orang melakukan poligami hanya dalam kondisi darurat dan benar-benar membutuhkannya. Beberapa alasan yang membolehkan poligami menurutnya adalah : istri mandul, sementara itu keduanya stau salah satunya mengharapkan keturunan, si suami mempunyai kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya, si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri hingga kepentingan anak, jumlah perempuan melebihi dari jumlah pria (yang ini bisa terjadi karna adanya perang), banyaknya janda dan anak yatim yang perlu dilindungi, jumlah penduduk yang ternyata memang faktanya perempuan jauh lebih banyak ketimbang laki-laki. Lihat, al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, juz IV, h. 183-184.

⁹ An-Namlah, *ar-Rukhsah as-Syar'iyah*.....h. 52.

¹⁰ As-Syathibi, *Al-Muwafaqat*.....h. 301.

menurut para pakar tafsir disyaratkan bagi suami dibolehkan berpoligami jika ia dapat berlaku adil.¹² Sebaliknya, jika suami tidak mampu berlaku adil, maka haram baginya untuk berpoligami kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak, seperti istri dalam kondisi mandul, sakit, suami mengalami hiperseksual dan sebagainya. Oleh sebab itu, berubahnya hukum haram menjadi boleh tanpa adanya keadilan dari pihak suami inilah yang termasuk *rukhsah*.¹³

b. Rukhsah Memandang Wajah Wanita Dikhitbah

Pada dasarnya, syariat mengharamkan memandang wajah wanita bukan mahram dengan pandangan yang berdampak kepada timbulnya fitnah atau dalam bahasa fikih disebut *an-nazar bi at-talaẓuz*. Meskipun demikian, hukum Islam bukan ajaran yang kaku, tetapi sangat fleksibel. Itu sebabnya, larangan memandang wajah wanita bukan

mahram ini berlaku bagi kaum laki-laki yang tidak memiliki keperluan terhadap wanita tersebut. Karena dalam Islam membolehkan memandang lawan jenis bagi yang memiliki hajat dalam beberapa keperluan. Misalnya, seorang wanita yang menjadi saksi dalam pengadilan, maka seorang hakim boleh melihat wajahnya. Seorang dokter laki-laki dapat memandang wajahnya wanita untuk keperluan pengobatan. Demikian pula, dalam kasus melamar (*khitbah*) wanita bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memandang wajah dan telapak tangan wanita tersebut yang hendak dinikahinya. Begitu juga sebaliknya, wanita dibolehkan memandang wajah.

Dengan demikian, hukum azimahnyanya dalam kasus ini adalah diharamnya laki-laki untuk memandang perempuan bukan mahramnya secara *talaẓẓudẓ* yakni pandangan yang akan menimbulkan fitnah. Namun, karena adanya kebutuhan syar'i, maka larangan tersebut berubah menjadi kebolehan. Hukum bolehnya memandang wajah wanita bagi laki-laki pelamar wanita inilah yang disebut *rukhsah*. Yakni perubahan hukum dari yang diharamkan menjadi dibolehkan sebab adanya uzur yaitu berupa *hajat* (kebutuhan) yang dilegitimasi syariat dalam rangka memantapkan hati calon suami atas calon istrinya dengan melihat wajah dan telapak tangannya sebagai simbol kecantikan dan keluwesan wanita yang hendak dinikahi tersebut.

c. Rukhsah Nikah Mut'ah pada Awal Islam

Nikah *mut'ah*, pada awal Islam saat kondisi darurat hukumnya diperbolehkan, kemudian baru datang *nas*-*nas* yang melarangnya hingga hari Kiamat. Di antara dalil-dalil kebolehan nikah *mut'ah* di awal Islam yaitu:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

“Dari Salamah bin Akwa`Radhiyallahu ‘anhu, ia

¹² Keadilan menurut Qurash Shihab, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir *al-Misbah*, mengatakan bahwa pada ayat ketiga surah an-Nisa', sang suami diperintahkan untuk berlajau adil diantara istri-istrinya, dan pada ayat ke-129 ini Allah menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan dalam hal cinta. Karena cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat yang pahit, tidak disukai oleh siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap orang. Tetapi obat yang sama akan di sukai dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan disini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan "Janganlah kamu terlalu cenderung (kepada orang yang kamu cintai), dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai. Lihat, Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 607

¹³ Menurut penulis, kebolehan berpoligami ketika suami mampu bersikap adil, bukanlah suatu *rukhsah*. Karena pada dasarnya, kebolehan itu berdasarkan petunjuk langsung dari teks, atau dengan kata lain bahwa poligami atau tidak, tergantung terhadap kemampuan seorang laki-laki (suami) dalam hal bersikap adil terhadap para istri-istrinya.

berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan keringanan dalam mut’ah selama tiga hari pada masa perang Awtas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang kami.”¹⁴

Hadis di atas, menunjukkan bahwa nikah mut’ah pada awal-awal Islam merupakan keringanan atau rukhsah bagi umat Islam yang memiliki kondisi-kondisi tertentu yang mendesak. Oleh karenanya, Rasulullah saw memberikan kemudahan dengan diperbolehkannya nikah mut’ah bagi para sahabat ketika itu.

Meskipun demikian, hukum kebolehan nikah mut’ah tidak berlaku selamanya. Artinya hanya bersifat temporer dan sebelum keputusan akhir dari Rasulullah bahwa hukum nikah mut’ah menjadi haram. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Muslim, : dari Muhammad bin Ali (yang dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiah), bahwa ayahnya Ali (bin Abu Thalib) berkata kepada Ibnu Abbas ra. : “Sesungguhnya Nabi saw. melarang mut’ah dan daging keledai pada masa Khaibar.”¹⁵

¹⁴HR Muslim, 9/157, (1405).

¹⁵Riwayat pengharaman nikah mut’ah pada penaklukan kota Makkah, yaitu riwayat dari Rabi’ bin Sabrah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada penaklukan kota Makkah. Kami tinggal lima belas hari. Kemudian, oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kami diperbolehkan untuk mut’ah. Akupun keluar bersama seseorang dari kabilahku. (Kebetulan) aku mempunyai sedikit ketampanan, sedangkan kerabatku tersebut lebih mendekati jelek. Setiap kami membawa sal, salku jelek, sedangkan sal anak pamanku tersebut baru dan mengkilap. Ketika kami sampai di kaki Makkah atau di puncaknya, kami bertemu dengan seorang gadis perawan, panjang lehernya semampai. Kami berkata, “Apakah engkau mau bermut’ah dengan salah seorang dari kami?” Dia berkata, “Dengan apa kalian bayar?” Maka setiap kami membentangkan salnya. Lalu wanita itu melihat kami, dan sahabatku itu melihat ketiaknyanya dan berkata: “Sesungguhnya sal dia jelek, sedangkan salku baru, mengkilap”. Dia berucap, “Salnya tidak apa-apa,” dua kali atau tiga. Lalu aku melakukan mut’ah dengannya. Belum usai aku keluar dari Makkah, kiranya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengharamkannya. HR Muslim, 9/158, (1406).

d. Rukhsah Suami Memukul Istri yang Nusyuz

Dalam menjalin hubungan suami istri memang tidak selamanya mulus. Bahkan banyak terkadang di antara mereka dipenuhi dengan pertengkaran dan percekocokan yang tidak berkesudahan. Rumah tangga menjadi hancur berantakan, tidak memunculkan kebahagiaan apapun. Seringkali setiap terjadi pertengkaran istri selalu di pihak yang dipersalahkan. Akan tetapi, bila benar istri yang menyebabkan ketidakharmonisan itu, karena ia melakukan hal-hal yang dapat mengabaikan kewajibannya sebagai istri, maka sikap mengabaikan kewajiban sebagai istri ini disebut dengan nusyuz.

Perintah dalam al-Quran “وَاضْرِبُوهُنَّ” dalam konteks ini bukannya serta merta memberi izin kepada suami untuk memukul istrinya secara mutlak.

Pemukulan diperbolehkan bagi suami setelah melalui dua tahap yaitu menasihati istri¹⁶. Jika dengan menasihati istri tetap *nusyuz* (membangkang), maka tahap selanjutnya adalah pisah ranjang. Jika dengan pisah ranjang istri masih tetap *nusyuz*, maka suami boleh memukulnya. Pemukulan ini harus meliputi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. *Kedua*, pemukulan tidak sampai meninggalkan bekas, yakni menggunakan alat seringan-ringannya misalnya dengan menggunakan siwak, sapu tangan, dan sejenisnya. *Ketiga*, pemukulan dalam rangka mendidik, bukan yang bersifat dendam dan ingin menang sendiri. *Keempat*, pemukulan hanya dilakukan sepanjang memberikan efek

¹⁶Syaikh Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur menyatakan, wewenang memukul istri diberikan pada suami demi kebaikan kehidupan rumah tangga. Pemukulan diserahkan pada suami karena ia yang mempunyai kewajiban untuk mendidik istrinya. Ketika pemukulan tidak bisa lagi efektif untuk memulihkan kehidupan rumah tangga yang baik, maka wewenang itu bisa dicabut. Lihat, Faqihuddin Abdul Kodir, dkk. *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), h. 111.

manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan relasi suami istri.¹⁷

Dengan demikian, kebolehan suami memukul istri yang telah melakukan nusyuz merupakan rukhsah dalam rangka memberikan pendidikan kepada sang istri. Adapun sebab kebolehan ini adalah adanya kebutuhan (*hajat*) untuk menciptakan keharmonisan yang diidamkan melalui pemukulan yang tidak melukai. Tentunya, dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya yakni tidak serta merta memukul istrinya tanpa dinasehati terlebih dahulu. Sebaliknya, jika dengan pemukulan itu justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka suami selamanya tidak diperbolehkan memukul istrinya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penelitian tentang konsep rukhsah dan implikasinya dalam hukum pernikahan dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, para *ushuliyun* berbeda pendapat dalam menguraikan konsep rukhsah. Meskipun demikian, dapat ditarik titik temu bahwa rukhsah menurut para pakar ushul yaitu suatu perubahan hukum disebabkan adanya uzur (halangan). Adapun uzur secara umum yang dapat menyebabkan seseorang mendapat rukhsah sebagai berikut: *ad-dharurah* (keadaan darurat), *al-masyaqqah* (kondisi sulit), *as-safar* (kondisi bepergian), *al-ikrah* (kondisi dipaksa), *al-maradh* (kondisi sakit), *an-nisyan* (kondisi lupa), *al-kebata* (kondisi keliru), *al-jahl* (kondisi tidak tahu), *umum al-balwa* (kesulitan yang umum) dan *an-naqsh* (kondisi kekurangan).

Kedua, relasi antara rukhsah dan *maqashid syariah* memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut, nampak dari tujuan utama daripada rukhsah yang diberikan oleh *Syar'* kepada umat manusia tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Selain itu, dengan adanya rukhsah ini manusia dapat

terhindar dari segala kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh setiap manusia dalam kondisi-kondisi darurat tertentu. Lebih dari itu, relasi keduanya juga dapat tercermin dari definisi kedua term *rukhsah* dan *maqashid syariah*, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Dengan demikian, hubungan antara *maqashid syariah* dan *rukhsah* meliputi: *pertama*, keduanya memiliki prinsip yang sama, yakni memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi setiap mukallaf. *Kedua*, keduanya memiliki tujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Ketiga, implikasi hukum yang ditimbulkan dari konsep rukhsah di bidang hukum pernikahan adalah di antaranya: (1) hukum dibolehkannya berpoligami bagi laki-laki, meskipun tidak mampu secara materi dan bersikap adil terhadap para istrinya jika memiliki uzur, seperti laki-laki hiperseksual, istrinya mandul dan sebagainya. (2) hukum diperbolehkannya memandang wanita yang dikhitbah karena adanya kebutuhan/alasan, diantaranya untuk memantapkan hati bagi si pelamar. (3) hukum dibolehkannya nikah mut'ah di zaman Rasulullah.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis perlu memberikan saran bagi kalangan akademisi kampus. Pertama, Kajian tentang rukhsah dan implikasinya terhadap hukum Islam sangat urgen dalam rangka pengembangan hukum. Pada penelitian ini, hanya difokuskan pada implikasi konsep rukhsah terhadap kajian fiqh munakahat atau hukum pernikahan. Keterbatasan ini, nantinya diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan diadakannya penelitian lanjutan dengan tema yang sama tetapi dengan pendekatan yang mungkin berbeda. Kedua, urgensi penelitian model kajian ushul fiqh sangat penting kiranya untuk dilanjutkan penelitian semacam ini dengan memfokuskan pada implikasi rukhsah terhadap bidang kajian bab fikih khususnya pada bab *fiqh jinayat* dan *fiqh muamalat*. Karena penelitian tentang seputar rukhsah, umumnya banyak hanya mengaitkan dengan bab *fiqh ibadat* saja. Dengan demikian, nantinya diharapkan kajian rukhsah dan implikasinya terhadap hukum

¹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 242

Islam menjadi lebih komprehensif dari berbagai bab-bab fiqh, mulai *ibadat*, *muamalat*, *munakahat* dan *jinayat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Muhammad Husain, *Al-Wadib fi Us}ul al-Fiqh*, (Kairo: Dar as-Salam, 1995),
- An-Namlah, Abdul Karim bin Ali, *Ar-Rukbas} As-Syar'iyah wa isbatuha Bil Qiyas* (Riyadh: Maktabah Ar-Rasyd, 1990).
- Az-Zarkasyi, *Tasnif al-Masami' bi Jam'i al-Jawami'* (tt.: Muassasah Qardubah, 1999)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).
- Biek, Muhammad Hudhari, *usul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1999).
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2007),
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Muqtashid* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1415).
- Izz ibnu Abdul as-Salam - *Qawa'id al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).
- Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu usul Fiqh*, (Dar Al-Qalam, Kuwait, tt.).
- Salim, Muhammad Husni Ibrahim, *ar-Rukbas wa asbab at-Tarakhus} fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar at-tabaah al-Muhammadiyah, 1987),
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaunkani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999)
- Usamah Muhammad bin Muhammad as-Sollabi, *ar-Rukbos as-Syar'iyah: Ahkamuha wa Dhawabithuha*, (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002).